

BAHAN BAKU: URAT NADI INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Yonvitner

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
 Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
 Email: yonvitr@yahoo.com

RINGKASAN

Sejak pencanangan industrialisasi perikanan 2011 dan menjadi makin populer tahun 2012 sektor perikanan mulai melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut dimulai dengan mendorong peningkatan produksi perikanan untuk komoditas yang potensial dikembangkan secara ekonomi. Beberapa komoditas unggulan diantaranya adalah udang, ikan patin, dan komoditas budidaya lainnya. Sementara itu komoditas tangkap terus digenjut untuk mendukung industri UMKM (pengolahan) seperti ikan asin, asap dan pindang. Namun setelah beberapa tahun berjalan, belum terlihat perkembangan yang signifikan dari tahapan pencapaian program tersebut. Permasalahan terus menggeluti usaha ini mulai dari bahan baku yang langka, logistik yang tidak tersedia, sampai pada kebijakan impor dari pemerintah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahan baku yang ada di perairan mencukupi untuk bahan baku industri pengolahan ikan kelompok UMKM nasional.

Kata kunci: stok ikan, bahan baku, industri pengolahan ikan, logistik perikanan

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Impor ikan dilakukan karena terjadi kekurangan bahan baku.
- ◆ Stok ikan tersedia cukup untuk kebutuhan industri UMKM.
- ◆ Logistik perikanan yang tidak memadai.
- ◆ Kecukupan bahan baku merupakan kunci utama keberhasilan industrialisasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Distribusi stok yang tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan di mana sebagian besar stok bahan baku terdapat di wilayah timur Indonesia. Untuk menjamin

ketersediaan bahan baku secara kontinu dan berkesinambungan diperlukan sistem tata niaga (logistik) yang kuat dan tangguh. Sistem logistik perikanan harus dikembangkan atau dibangun mulai dari pusat stok ikan (stocking area), perkapalan dan sistem pendukung termasuk bahan bakar.

- ◆ Perlu intervensi berupa komitmen kebijakan pemerintah untuk tidak memberlakukan impor terhadap ikan yang menjadi bahan baku dan tersedia di perairan Indonesia.
- ◆ Mendorong peningkatan penyerapan pasar terhadap hasil industri pengolahan perikanan ke pasar lokal dengan mendorong hasil berstandar internasional.

I. PENDAHULUAN

Gagasan industrialisasi bukan gagasan omong kosong jika diikuti dengan upaya untuk membangun setiap rantai sistem usaha tersebut. Namun akan menjadi omong kosong apabila nelayan, pembudidaya, pengolah dan perdagangan tidak dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan penghasilan mereka.

Nelayan kita menyediakan bahan pangan secara keseluruhan dari budidaya dan tangkap mencapai 12,7 juta ton per tahun (termasuk 4,3 juta ton dari rumput laut (KKP, 2011)). Artinya 8,4 juta ton komoditas perikanan akan mampu memenuhi tingkat konsumsi pangan ikan masyarakat Indonesia setiap tahunnya yang hanya mencapai 7,1 juta ton. Secara logika kita mendapati ternyata ketersediaan ikan nasional cukup untuk menopang bergerakinya industri perikanan. Karena kebutuhan ikan yang mencapai 7,1 juta ton tersebut termasuk didalamnya ikan olahan yang diolah UMKM lebih kurang 3 juta ton (Heruwati, 2002).

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan dan persebaran bahan baku menurut wilayah propinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sesungguhnya impor perikanan bukan karena kebutuhan industri tetapi karena sikap politik yang tidak mau membangun sistem usaha pengolahan ikan nasional secara sungguh-sungguh.

II. METODE DAN HASIL KAJIAN

Kajian kebutuhan bahan baku Industri pengolahan hasil perikanan untuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan di

beberapa lokasi contoh, untuk daerah pengolah ikan pindang, asin, asap dan lainnya. Formulasi model ketersediaan bahan baku dilakukan mengikuti model secara formal berdasarkan variabel, parameter dan relasi yang didefinisikan pada tahap karakterisasi sistem. Berdasarkan formulasi tersebut kemudian dikembangkan suatu metode pencarian solusinya dari bahan baku. Formulasi model dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang masing masing mempunyai prosedur formulasi model yang berbeda, yaitu: 1) Formulasi model analitik (matematika), 2) Formulasi model heuristik, dan 3) Formulasi model simulasi.

Formulasi bahan baku dan produk olahan hasil perikanan mencakup proses pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk penyusunan formulasi bahan baku adalah: 1) jumlah paket produksi per hari untuk tiap jenis produk olahan ikan. 2) jumlah ulangan dalam setiap proses produksi untuk tiap jenis produk olahan ikan. 3) kuantitas ikan yang diolah pada setiap kali proses produksi. 4) frekuensi produksi bulanan atau tahunan dan 5) unit pengolahan setiap bulan atau tahunan dari satu jenis proses pengolahan ikan.

Model prediksi data yang digunakan adalah data time series. Data-data tersebut harus tersedia agar dapat dijelaskan perubahan untuk mengurangi resiko penyimpangan model prediksi. Formula yang digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku pertahun untuk setiap jenis UPI (pindang, asin dan asap) per klasifikasi (mikro, kecil dan menengah) dan menghitung kebutuhan bahan baku secara total per tahun dari ketiga kelompok tersebut. Dengan menggunakan data jumlah UPI per jenis UPI dan per klasifikasi pada tahun 2011, kebutuhan bahan baku untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut dapat ditentukan. Asumsi yang digunakan dalam kajian

ini adalah tidak terjadi perubahan (kenaikan/ penurunan) jumlah unit pengolahan ikan selama studi berlangsung. Hasil kajian terhadap

kebutuhan bahan baku dari setiap jenis unit pengolah ikan (UPI) dari unit pindang, asin, asap dan lainnya diperoleh seperti Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan bahan baku pada tahun 2011

jenis upi	klasifikasi usaha	kebutuhan bahan baku (ton)	kebutuhan bahan baku (juta ton)
pindang	Mikro	380.775	0,381
	Kecil	176.825	0,177
	Menengah	154.000	0,154
Sub Total		711.600	0,712
asin	Mikro	740.736	0,741
	Kecil	706.464	0,706
	Menengah	580.800	0,581
Sub Total		2.028.000	2,028
asap	Mikro	243.721	0,244
	Kecil	127.969	0,128
	Menengah	414.962	0,415
Sub Total		786.653	0,787
lainnya	Mikro	456.870	0,457
	Kecil	326.920	0,327
	Menengah	332.800	0,333
Sub Total		1.116.590	1,117
TOTAL		4.642.843	4,643

Sumber: KKP dan Hasil analisa bahan baku (2011)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan bahan baku untuk unit pengolahan pindang adalah 711.600 ton pertahun, untuk unit pengolahan asin sebesar 2.028.000 ton per tahun, untuk unit pengolahan asap sebesar 786.653 ton pertahun dan untuk pengolahan lainnya sebesar 1.116.590 ton per tahun. Dari data tersebut jumlah kebutuhan bahan baku total pada tahun 2011 berdasarkan data UPI mencapai 4.642.843 ton (4,643 juta ton per tahun) dengan perkembangan sebesar 6,59% per tahunnya (DJPT, 2012).

Analisis kebutuhan bahan baku per propinsi,

metode perhitungan yang digunakan adalah pengklasifikasian UPI juga berdasarkan kelompok usaha UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai yang lebih spesifik pada pengelompokan UMKM tersebut. Formula yang digunakan pada perhitungan bahan baku per propinsi sama dengan formula yang digunakan pada perhitungan bahan baku secara nasional seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk sektor usaha UMKM per propinsi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah kebutuhan bahan baku sektor UMKM per propinsi

PROVINSI		BAHAN BAKU UMKM (ton)				TOTAL
		PINDANG	ASIN	ASAP	LAINNYA	
1	Aceh	6.750	270.780	32.107	30.700	340.337
2	Sumatera Utara	1.950	92.460	1.431	51.250	147.091
3	Sumatera Barat	525	41.328	6.160	28.410	76.423
4	Riau	-	32.160	19.855	13.040	65.055
5	Jambi	38	4.404	172	12.780	17.393
6	Sumatera Selatan	-	5.028	4.557	58.140	67.725
7	Bengkulu	-	8.712	5.885	18.690	33.287
8	Lampung	1.250	44.652	4.340	21.470	71.712
9	Bangka Belitung	-	4.476	103	38.890	43.469
10	Kepulauan Riau	263	14.796	252	22.170	37.480
11	DKI Jakarta	7.163	28.668	733	34.950	71.513
12	Jawa Barat	180.188	35.280	1.523	70.900	287.890
13	Jawa Tengah	226.813	225.420	420.847	205.160	1.078.240
14	DI Yogyakarta	4.350	216	275	9.170	14.011
15	Jawa Timur	102.775	384.984	198.618	220.420	906.797
16	Banten	10.375	20.208	412	18.300	49.295
17	Bali	34.100	2.256	1.088	21.620	59.064
18	Nusa Tenggara Barat	120.213	49.140	16.397	40.220	225.969
19	Nusa Tenggara Timur	-	10.920	34	1.950	12.904
20	Kalimantan Barat	2.038	86.940	1.397	45.220	135.594
21	Kalimantan Tengah	75	34.392	-	4.490	38.957
22	Kalimantan Selatan	38	115.152	34	20.820	136.044
23	Kalimantan Timur	75	58.464	447	22.010	80.996
	Bagian Barat Indonesia	698.979	1.570836	716667	990961	3.997246
24	Sulawesi Utara	-	9.744	24.756	12.100	46.600
25	Sulawesi Tengah	750	20.088	9.378	14.360	44.576
26	Sulawesi Selatan	7.013	387.924	6.721	39.600	441.258
27	Sulawesi Tenggara	4.713	24.216	15.733	14.320	58.981
28	Gorontalo	-	3.492	859	10.200	14.551
29	Sulawesi Barat	-	4.560	2.027	3.240	9.827
30	Maluku	150	1.764	2.405	2.840	7.159
31	Maluku Utara	-	2.088	4.878	3.790	10.756
32	Papua Barat	-	984	137	3.310	4.431
33	Papua	-	2.304	3.092	2.060	7.456
	Bagian Timur Indonesia	12626	457164	69986	66616	645595
JUMLAH		711.600	2.028.000	786.653	1.116.590	4.642.843

Berdasarkan data kebutuhan bahan baku per propinsi tersebut dapat dilihat bahwa propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan propinsi dengan kebutuhan bahan baku UPI UMKM tertinggi yakni secara berturut-turut adalah 1.078.240 ton dan 906.797 ton. Sementara itu jika dibandingkan wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia, maka kebutuhan bahan di bagian barat mencapai 3.997.246 kg pertahun (86,1%), sementara di timur Indonesia mencapai 645.595 kg pertahun (13,9%). Artinya distribusi bahan baku tidak merata seperti distribusi stok, sehingga diperlukan dukungan logistik yang memadai (Hermawan, 2012).

Untuk memenuhi bahan baku tersebut potensi stok ikan sebesar 6,5 juta ton. Menurut data P4KSDI (2011) sebesar 52 % stok tersebar di kawasan Indonesia Barat yang pada kenyataannya sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap (*fully and over exploitation*). Sementara itu Indonesia Timur sekitar 44% mengalami full eksploitasi, dan 26% dalam kondisi tereksplorasi sedang dan 30% dalam kondisi uncertain. Dengan fakta tersebut, sesungguhnya kita sangat paham bahwa pengelolaan perikanan tangkap yang harus dilakukan adalah dengan melakukan *closing area* disebagian wilayah barat Indonesia sementara di Indonesia timur mengoptimalkan kegiatan penangkapan dengan membangun sistim jaringan logistik nasional.

Dalam mengurai benang kusut distribusi hasil perikanan, pembangunan logistik perikanan tidak

hanya pada upaya membangun unit penampungan ikan (saat panceklik saja) yang dikenal bulog perikanan, tetapi juga pada upaya membangun tatanan rantai distribusi perikanan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sebesar 812 ribu ton ikan sampai 1,748 juta ton ikan di wilayah perairan Indonesia timur setidaknya memerlukan dukungan sebanyak lebih dari 10 unit kapal *carrier* dan prasarana perikanan tangkap. Jumlah ini dapat berkembang apabila kawasan konservasi mampu meningkatkan stok.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2012. Statistik Perikanan Tangkap. Dit SDI. 2012. Jakarta
- Hermawan, T. 2012. Sistem Logistik Ikan Nasional, Sebuah Tinjauan Kebijakan. Dit Perikanan dan Kelautan Bappenas.
- Heruwati, E,S. 2002. Pengolahan Ikan Secara Tradisional. (<http://www.pustaka-deptan.go.id>).
- Kemenetrian Kelautan dan Perikanan. 2011. Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya RI. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- P4KSDI. 2011. Dukungan Penelitian terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta